

3-31-2018

Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh di Korea Selatan (2004-2014)

Dana Pratiwi

Future Leader and Anti Corruption (FLAC) Indonesia, danapратиwi.dp@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Comparative Politics Commons](#), and the [Other Political Science Commons](#)

Recommended Citation

Pratiwi, Dana (2018) "Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh di Korea Selatan (2004-2014)," *Jurnal Politik*: Vol. 3: Iss. 2, Article 2.

DOI: 10.7454/jp.v3i2.1087

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh di Korea Selatan (2004-2014)

DANA PRATIWI *

Komunitas Future Leader and Anti Corruption (FLAC) Indonesia
Gedung PPSDMS, Nurul Fikri, Lantai 1
Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 20, Jakarta Selatan, 12640
Email: danapratiwi.dp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea Selatan pasca tahun 2004 cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah perolehan kursi oleh partai buruh di parlemen nasional, terjadi faksi-faksi dalam internal partai, renggangnya hubungan antara organisasi gerakan buruh dengan partai, partai tidak mampu memperluas basis dukungan dan juga belum mampu mengakomodir isu-isu kebijakan nasional lainnya. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada sumber data-data sekunder. Analisis penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Collins. Menurutnya, terdapat dua aspek yang menentukan sebuah gerakan agar dapat membentuk partai politik yang berhasil dalam politik elektoral. Kedua aspek tersebut yaitu kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan. Penulis berpendapat bahwa penyebab tidak efektifnya strategi elektoral gerakan buruh di Korea Selatan pasca tahun 2004 adalah adanya hambatan dalam kesempatan politik yang belum menguntungkan bagi gerakan buruh dan dalam mobilisasi sumber daya.

Kata Kunci: strategi politik elektoral, kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, gerakan buruh, Korea Selatan

ABSTRACT

This research aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the labor movement in South Korea tend to be ineffective after 2004. It can be seen by the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor movement and the party, the party is unable to expand its support base and to accommodate other national policy issues. This research uses a qualitative methods and the secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research conducted by Collins. She stated that there are two aspects that determine a movement in order to form a successful political party in electoral politics. The two aspects are the political opportunity and resource mobilization undertaken by the movement. I argue that the cause of ineffectiveness in the electoral strategy of labour movement in South Korea after 2004 were the existence of obstacles in the political opportunity which has not been favorable for them and in the resource mobilization.

Key words: electoral political strategies, political opportunity, resource mobilization, labor movement, South Korea

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.124>

* Penulis adalah anggota Komunitas FLAC Indonesia.

PENDAHULUAN

Berbeda dengan kelompok sipil lainnya, buruh menempati tempat khusus di antara kekuatan-kekuatan masyarakat sipil lainnya karena mereka memiliki kapasitas yang besar dan efektif untuk melakukan mobilisasi di saat terjadinya krisis pada suatu negara (Valenzuela 1988, 4). Terlebih kelompok buruh melalui aksi-aksinya juga dapat memengaruhi secara langsung kestabilan ekonomi dan politik suatu negara (Valenzuela 1988, 4; lihat juga Subono 2007; Azmy 2011). Hal tersebut sejalan dengan pengalaman gerakan buruh Korea Selatan, yang telah memperlihatkan bagaimana gerakan buruh dapat menjadi aktor yang cukup signifikan dalam memengaruhi dinamika ekonomi dan politik Korea Selatan. Momentum kesuksesan aksi Pemberontakan Sipil Juni 1987 menjadi bukti bahwa gerakan buruh Korea Selatan berhasil mengadvokasikan kepentingan mereka setelah selama puluhan tahun mereka dieksklusikan dalam proses perpolitikan negara. Selama puluhan tahun tersebut pula, buruh berada dalam tekanan represi negara yang dikuasai oleh rezim pemerintahan militer atas nama stabilitas politik dan ekonomi negara.

Aksi-aksi protes yang pernah dilakukan gerakan buruh di Korea Selatan bukanlah aksi tanpa sebab. Aksi protes mereka dikarenakan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka, seperti larangan kebebasan dalam berorganisasi, tidak diimplementasikannya undang-undang perburuhan, dan buruknya kondisi kerja yang mereka alami. Saat era rezim otoritarian sebenarnya telah ada organisasi gerakan buruh yang direpresentasikan oleh *Federation of Korean Trade Union* (FKTU). Namun organisasi tersebut tidak menjalankan fungsi dan perannya untuk membawa kepentingan hak-hak buruh karena dikooptasi oleh rezim pemerintah yang berkuasa. Barulah setelah tahun 1987, seiring dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis yang didukung melalui jaminan amandemen konstitusi, buruh kemudian dapat turut serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengorganisasian gerakan. Terbukanya era demokrasi di Korea Selatan, turut serta berpengaruh terhadap perkembangan organisasi gerakan buruh. Gerakan buruh kemudian memiliki dua payung

organisasi yakni *Federation of Korean Trade Union* (FKTU) dan *Korean Confederation of Trade Unions* (KCTU). Sejak dilegalkan pada tahun 1996, KCTU pun tampil sebagai organisasi gerakan buruh yang paling radikal dan militan, bersamaan dengan transformasi FKTU yang mulai memperjuangkan kepentingan kelompok buruh. Kedua organisasi ini kemudian menjadi aktor utama yang merepresentasikan gerakan buruh di Korea Selatan.

Dalam keterkaitannya dengan upaya buruh untuk mewujudkan kepentingan tujuan gerakan mereka, tentu diperlukan sebuah strategi gerakan yang efektif. Berdasarkan temuan hasil studi Budiman (1987, 11), setidaknya terdapat dua macam sumber kekuatan yang dimiliki oleh suatu kelompok dalam melakukan perjuangan politik, yakni strategi mobilisasi massa, yaitu strategi yang digunakan oleh suatu kelompok dengan menggunakan kekuatan massa dan strategi negara yaitu dengan berupaya menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan perlawanan. Pembentukan partai oleh sebuah gerakan dapat dikatakan menjadi bentuk dari strategi politik elektoral gerakan sosial yang mana hal tersebut menjadi bagian dari penggunaan strategi negara seperti yang dikemukakan oleh Arief Budiman. Pada kasus strategi gerakan buruh Korea Selatan, memperlihatkan bahwa gerakan buruh di era demokrasi tidak lagi hanya menggunakan strategi mobilisasi massa saja. Mereka kemudian juga dapat menggunakan strategi politik elektoral, yakni dengan dibentuknya *Korean Democratic Labor Party* (KDLP) pada tahun 2000 oleh KCTU. Kwon Young Khil yang merupakan ketua KCTU saat itu dipilih sebagai ketua partai. Pembentukan partai ini sebagai respon politik buruh akibat ketidakpuasan mereka akan sikap pemerintah dalam menangani krisis ekonomi tahun 1997 (Wilson 2004, 44). Sikap pemerintah yang berkuasa saat itu di bawah kepemimpinan presiden Kim Dae Jung (1998-2003) memperlihatkan bagaimana upaya pemerintah untuk menangani krisis pada akhirnya dengan melakukan kesepakatan politik dan pro dengan kepentingan pasar sehingga merugikan kelompok buruh (Wilson 2004, 44). FKTU pun kemudian pada tahun 2004 membentuk *Green Social Democratic Party* (GSDP). Meskipun terdapat dua partai representasi buruh, namun keduanya

sama-sama memiliki kesamaan tujuan, yakni membawa kepentingan buruh dalam politik.

Mengacu pada studi Collins (2006) dan juga Yunjong Kim (2012), penulis mempelajari jika strategi politik elektoral gerakan buruh atau dalam hal ini yakni partai buruh dikatakan berhasil ketika hubungan antara gerakan buruh dan partai buruh saling terikat, struktur organisasi dalam internal partai kuat dan demokratis, partai dapat memperluas basis dukungan, terpilihnya kandidat-kandidat mereka dalam pemilihan umum, serta dapat mengakomodir kepentingan konstituennya dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada dinamika partai buruh pada tahun 2000-2004. Diawali dengan kemenangan KDLP dalam pemilihan lokal tahun 2002 dengan memperoleh 8,3 % suara (Gray 2008, 117). Lalu dalam pencalonan presiden, Kwon Young Khil memperoleh peningkatan perolehan suara dibandingkan ketika ia mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden tahun 1997 bersama *People's Victory 21* (PV21), yang merupakan partai aliansi progresif yang dibentuk oleh KCTU bersama gerakan sosial lainnya (Wilson 2004, 47). Dalam pemilihan umum presiden tahun 2002 KDLP hanya mendapatkan 957.148 suara atau 3.9 persen suara (National Election Commission 2013). Angka ini terbilang lebih tinggi dibandingkan saat ia menjadi calon kandidat presiden PV21 dengan perolehan 306.026 suara. Kemudian, dalam pemilihan umum parlemen nasional tahun 2004, KDLP menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi ketiga. Meskipun GSDP gagal dalam pemilihan umum parlemen nasional tahun 2004 dan pada akhirnya bubar, namun kegagalan GSDP tersebut tidak menjadi akhir strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan. Diketahui bahwa sejumlah anggota FKTU pun juga mendukung KDLP (Choi 2005, 248). Akan tetapi, pasca tahun 2004 justru terlihat adanya sejumlah persoalan yang memperlihatkan jika strategi politik elektoral mereka kemudian menjadi cenderung tidak efektif.

Pasca tahun 2004 terlihat bahwa hubungan antara organisasi buruh dan partai tidak lagi terikat. KCTU sebagai pendiri KDLP tidak lagi menjadi aktor pada aktivitas utama partai (Kim 2012, 208). Struktur internal organisasi buruh dan partai juga tergolong tidak kuat karena

adanya faksi-faksi dan juga konflik kepemimpinan. Pada tahun 2007, terjadi puncak konflik faksi dalam internal partai karena adanya faksi *National Liberation* di bawah kepemimpinan Kwon Young Khil yang lebih fokus pada persoalan reunifikasi Korea Utara dan mengutamakan agenda anti-Amerika (*Juche Ideology*). Selain itu, terdapat faksi *People's Democracy* di bawah kepemimpinan Shim Sang-jeong yang lebih mengutamakan permasalahan kesejahteraan sosial dan kebebasan sipil di Korea Selatan (Hellman 2011, 45). Akibatnya, muncul partai progresif baru lainnya seperti pembentukan *New Progressive Party* (NPP) pada tahun 2008 oleh faksi *People's Democracy*, lalu disusul *Unified Progressive Party* (UPP) (2011), dan *Progressive Justice Party* (2012). KDLP pun kemudian bubar pada tahun 2011 dan anggotanya terpecah ada yang bergabung dengan NPP dan UPP.

Persoalan internal partai buruh juga semakin bermasalah dengan adanya perbedaan sikap antara partai dengan organisasi, seperti sikap *Labor Party* (NPP mengganti nama pada tahun 2013), dengan KCTU dan FKTU (Ryu, wawancara *e-mail* pada 12 Juni 2017). Partai buruh Korea Selatan juga tidak bisa memperluas basis dukungan mereka. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan menurunnya perolehan suara partai-partai buruh pasca tahun 2004. KDLP sendiri mengalami penurunan perolehan kursi parlemen nasional dari 10 kursi pada tahun 2004, lalu menjadi 5 kursi pada tahun 2008. Sedangkan, NPP hanya dapat memperoleh kursi parlemen lokal dan UPP dapat memperoleh 7 kursi parlemen nasional pada tahun 2012 (National Election Commission 2013). Namun, menjelang pemilihan umum 2012, terjadi faksi dalam internal UPP. Faksi UPP yang memisahkan diri kemudian membentuk *Progressive Justice Party* (PJP) yang dipimpin oleh Sim Sang Jung, sedangkan UPP dipimpin Lee Jung Hee (McGrath 2012). Pada akhirnya UPP juga bubar pada tahun 2014 karena adanya dugaan interaksi antara anggota UPP dengan pihak Korea Utara, di mana hal tersebut telah melanggar peraturan National Security Law (Valori 2016). KCTU pun menarik dukungannya untuk UPP pasca skandal tersebut (McGrath 2012). Akibatnya, buruh tidak lagi memiliki representasi partai dalam parlemen saat itu karena anggota UPP di parlemen kemudian

menghadapi proses hukum. Sedangkan, menjadi penting bagi partai buruh untuk dapat memiliki perolehan kursi di parlemen nasional. Hal tersebut sejalan dengan fungsi parlemen nasional yang merupakan lembaga representasi rakyat. Kandidat partai buruh Korea Selatan yang berhasil terpilih dalam parlemen nasional juga terlihat belum dapat mewujudkan agenda program partai mereka. Mereka pun akhirnya belum dapat mengakomodir isu-isu yang menjadi isu kebijakan nasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi KDLP yang pada akhirnya hanya fokus pada isu reunifikasi Korea Utara (Sung 2008).

Dinamika strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan menunjukkan bahwa pasca tahun 2004 strategi mereka cenderung tidak efektif. Padahal menjadi penting bagi mereka untuk dapat mempertahankan strategi politik elektoral mereka mengingat partai politik dan sistem kepartaian memiliki peranan penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi alat legitimasi untuk segala bentuk ekspresi politik masyarakat dan mekanisme bagi perubahan (Bailey 2010, 35-36). Strategi politik elektoral gerakan buruh dapat menjadi strategi tambahan bagi mereka selain menggunakan strategi mobilisasi massa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengapa strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea Selatan pasca tahun 2004 menjadi cenderung tidak efektif. Penulis berpendapat bahwa persoalan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari adanya hambatan yang dimiliki oleh mereka pada era demokrasi, yaitu adanya hambatan dalam kesempatan politik yang belum menguntungkan bagi gerakan buruh dan dalam mobilisasi sumber daya. Kedua hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam kompetisi politik elektoral.

STUDI LITERATUR

Terdapat sejumlah studi sebelumnya yang membahas mengenai gerakan buruh dan partai buruh di Korea Selatan, seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Wilson (2006). Dalam jurnalnya, Wilson membahas bagaimana perkembangan gerakan buruh Korea Selatan hingga membentuk partai buruh yakni KDLP yang kemudian dapat memperoleh kursi

parlemen nasional. Menurutnya, upaya strategi formal yang dilakukan oleh gerakan buruh dengan pembentukan KCTU dan terlibatnya buruh dalam “panggung elektoral” membuat kelompok buruh tampil sebagai kekuatan baru dalam politik Korea Selatan (Wilson 2004, 37). Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dinamika yang berkembang dalam strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea Selatan yang diwarnai dengan faksi-faksi yang kemudian mendorong munculnya partai buruh yang baru, maka studi tersebut tidak lagi cukup memberikan jawaban untuk menjawab persoalan tersebut.

Literatur lainnya kemudian menunjukkan bagaimana adanya perubahan pada gerakan buruh Korea Selatan di era demokrasi, khususnya pasca tahun 2004. Pada studi yang dilakukan oleh Nugrahen (2015), yang secara garis besar memperlihatkan bahwa pasca krisis ekonomi 1997-1998 gerakan buruh mengalami pelemahan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh kebijakan penanganan krisis yang disepakati pemerintah melalui kerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan juga dipengaruhi oleh internal gerakan buruh itu sendiri. Terkait perihal pengaruh neoliberalisme ini juga dibahas oleh Kevin Gray (2008). Menurutnya, kemenangan KDLP mengandung dua arti bagi demokrasi di negara-negara dunia ketiga, yakni menjadi cerminan bahwa adanya ketidakpuasan dan perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme di mana upaya perlawanan tersebut datang melalui institusi politik formal (Gray 2008, 108). Dampak kebijakan neoliberalisme pasca penanganan krisis ekonomi tahun 1997 dan dominasi Amerika Serikat berpengaruh terhadap kekuatan gerakan massa yang menjadi terbatas, sehingga hal tersebut juga menjadi tantangan bagi partai progresif di Korea Selatan (ibid, 113). Dalam artikelnya Gray juga menyinggung masalah hubungan antara KDLP dan serikat buruh yang menurutnya diakibatkan oleh masalah faksi dalam internal partai (ibid, 119).

Artikel yang ditulis oleh Yeonho Lee dan Yoo-Jin Lim (2006) memperlihatkan bahwa sebenarnya di balik kemenangan KDLP ada tantangan yang dihadapi oleh gerakan buruh di Korea Selatan. Lee dan Lim menganalisis prospek kemenangan KDLP pasca pemilihan umum 2004. Menurut Lee dan Lim (2006) bahwa kemenangan KDLP

dikarenakan adanya amandemen undang-undang pemilihan umum serta pemilih yang memilih KDLP saat itu dan adanya dukungan dari keberhasilan aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mendesak agar dilakukannya amandemen pemilihan umum. Menurut Lee dan Lim (2006), terdapat tantangan yang dihadapi oleh KDLP di antaranya legitimasi gerakan buruh itu sendiri dan juga struktur ekonomi dan politik Korea Selatan pasca tahun 1997.

Hasil studi Yunjong Kim (2012) menunjukkan bahwa adanya faktor struktural (*cold war* dan rezim militer) dan faktor agensi (kepemimpinan dan strategi gerakan kelompok sosialis) menyebabkan sosialisme tidak dapat berkembang di Korea Selatan, khususnya pasca Perang Korea tahun 1945-2007. Dalam tulisannya tersebut, ia juga melihat pula perkembangan KDLP sejak tahun 2000-2007 sebagai bagian dari gerakan sosialisme Korea Selatan di era demokrasi. Ia berpendapat bahwa KDLP sebagai partai berideologikan sosialisme telah gagal dalam upayanya untuk dapat memenangkan parlemen sebagai akibat dari faksi dalam partai yang didominasi oleh faksi *National Liberation* yang berideologikan sosialis radikal, yang hanya fokus pada masalah reunifikasi Korea Utara (2012). Akibatnya, mereka mengesampingkan gagasan sosialisme demokrat yang semula menjadi ideologi partai dan mereka tidak mampu memperluas basis dukungan serta mengembangkan aliansi mereka.

Dari studi-studi tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun hasil studi yang ada memang telah menyinggung persoalan gerakan buruh dalam politik elektoral, namun cenderung mengabaikan bahwa bagaimanapun persoalan tersebut tidak terlepas dari kapasitas internal gerakan buruh dalam menggunakan strategi yang digunakan. Studi-studi yang telah ada juga turut menyinggung masalah internal partai buruh dan juga gerakan buruh. Namun, pembahasan dalam studi-studi tersebut cenderung kurang menghubungkan bahwa persoalan yang dimiliki oleh gerakan buruh kemudian berpengaruh terhadap keberhasilan partainya. Studi-studi yang telah ada tersebut juga masih sebatas menekankan bahwa persoalan gerakan buruh di Korea Selatan pada era demokrasi sebagai implikasi dari perubahan ekonomi dan politik. Penulis meli-

hat bahwa hal tersebut tidak menjadi satu-satunya faktor tunggal atau dominan yang menentukan keberhasilan gerakan buruh dalam politik elektoral.

Berkaca pada proses keberhasilan KDLP mencapai kursi parlemen pada tahun 2004, penulis memaknai bahwa setidaknya gerakan buruh di Korea Selatan mampu menghadapi dampak negatif dari kondisi perubahan ekonomi dan politik dengan penguatan kapasitas internal gerakan mereka. Jika memang keberhasilan partai buruh di Korea Selatan saat itu karena adanya perubahan sistem pemilihan umum dan respon pemilih (Lee dan Lim 2006), maka patut dipertanyakan mengapa dari beberapa partai yang tergolong sebagai partai baru yang turut serta pada pemilihan umum tahun 2004 (National Election Commision 2013) hanya KDLP yang mampu memperoleh kursi parlemen nasional. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan perspektif gerakan sosial yang dalam hal ini terkait dengan kemampuan gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral, maka dapat menjawab persoalan yang terjadi pada strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea Selatan. Tanpa menegasikan hasil temuan studi-studi yang telah ada sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi temuan studi-studi sebelumnya dengan menganalisis persoalan tersebut melalui aspek kapabilitas gerakan buruh dalam politik elektoral.

GERAKAN BURUH DAN STRATEGI POLITIK ELEKTORAL

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis merujuk pada studi yang dilakukan oleh Collins yang membahas mengenai keterikatan antara gerakan sosial dengan partai politik yang dalam hal ini dapat dikatakan merupakan bentuk dari strategi politik elektoral gerakan sosial. Dalam studinya, Collins (2006) menganalisis apa yang mendorong dan menghambat gerakan sosial berpartisipasi dalam politik elektoral. Ia menganalisisnya dari sisi kemampuan gerakan sosial, karena menurutnya jika menggunakan kerangka teoritis dari teori-teori terkait partai politik dan sistem kepartaian saja, maka hanya dapat memberikan sedikit alasan kalau gerakan sosial dapat berhasil dalam membentuk partai

politik (*ibid*, 24). Ia pun kemudian menyebut partai yang dibentuk oleh gerakan sosial dengan partai gerakan sosial (*social movement parties*). Menurutnya, bahwa sebagian besar ilmuwan begitu pesimis terhadap kemampuan gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral (*ibid*, 20-21), padahal terdapat pula gerakan sosial yang bisa berhasil.

Dengan studi perbandingan politik, Collins mencoba membangun kerangka teoretis berdasarkan pada teori gerakan sosial, partai politik dan demokrasi untuk menjawab mengapa partai gerakan adat di Ekuador dapat berhasil lebih dahulu dibandingkan dengan partai gerakan adat di Bolivia yang padahal keduanya memiliki karakteristik politik yang sama. Kemunculan partai gerakan sosial ini dapat dikategorikan sebagai model partai baru karena karakteristiknya yang berbeda dengan partai yang telah ada sebelumnya (partai tradisional) (*ibid*, 6). Kemunculan partai gerakan sosial pun dapat mendorong konsolidasi demokrasi karena karakteristiknya yang bersifat akar rumput, mengandalkan internal organisasi yang demokratis dan hubungannya dengan gerakan sosial, di mana semua hal tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara luas di saat partai tradisional yang cenderung mengandalkan relasi klientelistik (*ibid*, 58-59).

Hasil studi Collins (2006) memperlihatkan bahwa gerakan sosial memiliki kemampuan untuk dapat membentuk partai gerakan sosial yang sukses dalam kompetisi arena politik elektoral. Partai gerakan sosial ini merupakan partai yang dibentuk oleh organisasi gerakan sosial dan ketika telah terbentuk partai pun tetap mempertahankan hubungannya dengan organisasi gerakan sosial (*ibid*, 20). Pengalaman partai gerakan adat di Ekuador, yakni Pachakutik, yang dapat sukses memenangkan pemilihan umum sejak dibentuk tahun 1996, membuktikan bahwa gerakan sosial yang membentuk partai dapat membawa aktor baru dalam arena politik, membawa inovasi baru dalam praktik politik dan menawarkan agenda program yang bersifat programatik atau tidak membawa kepentingan elit tertentu (*ibid*, 43). Meskipun terdapat pula partai gerakan sosial yang gagal, namun hal tersebut bukan berarti bahwa gerakan sosial tidak dapat berhasil dalam politik elektoral. Karenanya, Collins berpendapat bahwa untuk menjelaskan kemunculan

partai gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral, yang dalam hal ini diartikan bukan hanya sekedar dapat membentuk partai saja, namun dapat memiliki partai yang berhasil dalam kompetisi politik elektoral, tidak terlepas dari adanya struktur kesempatan politik yang menguntungkan bagi gerakan sosial, dan juga tergantung dari mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh gerakan sosial untuk kompetisi elektoral.

Dari studi Collins, konsepsi mengenai struktur kesempatan politik yang menguntungkan gerakan sosial ini dapat dilihat melalui perubahan volatilitas politik, perubahan sistem baru yang berkelanjutan, dan juga konteks struktur ekonomi dan politik. Pembahasan mengenai volatilitas politik yaitu perubahan pemilih dalam pemilihan umum dari satu partai ke partai lainnya dan bangkitnya partai-partai baru dan adanya kandidat independen yang berhasil melawan dominasi partai sebelumnya (*ibid*, 24). Lalu yang dimaksud dengan perubahan sistem baru yaitu perubahan sistem politik yang terjadi secara berkelanjutan seperti melalui perubahan konstitusi, yang dapat menjadi akses peluang bagi partai baru untuk dapat bersaing dengan partai sebelumnya. Kemudian konteks struktur ekonomi dan politik gerakan sosial yaitu merupakan faktor struktural terkait ekonomi dan politik yang ada pada suatu negara yang dimana kondisi ini berpengaruh terhadap gerakan sosial.

Pengalaman partai gerakan adat di Ekuador yang berhadapan dengan partai tradisional yang secara struktur organisasi tergolong kurang baik, tidak akar rumput dan mengandalkan relasi patron klien untuk mendapatkan dukungan serta unggul dalam sumber daya keuangan, tentu partai gerakan sosial sangat diuntungkan dengan kondisi tersebut (*ibid*, 52). Maka dia pun berpendapat bahwa gerakan sosial seharusnya dapat tampil memanfaatkan kelemahan partai tradisional tersebut dengan pengorganisasian gerakan. Namun di satu sisi partai gerakan ini lemah secara sumber daya, maka dari kasus partai gerakan adat di Ekuador dan Bolivia, Collins menemukan bahwa setidaknya terdapat sumber daya yang diperlukan oleh gerakan sosial untuk mengatasi persoalan tersebut. Collins mengklasifikasikannya ke dalam dua jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh gerakan sosial dalam politik elektoral. Berikut ini tabel penjabaran dari klasifikasi tersebut.

Tabel 1
Klasifikasi Sumber Daya Gerakan Sosial Dalam Politik Elektoral

Kekuatan eksternal (Outward Strength)	Kekuatan internal (Internal Strength)
Gerakan sosial masuk ke dalam organisasi level nasional	Gerakan sosial harus bersifat otonom dari negara dan aktor politik lainnya
Adanya pengakuan secara nasional	Adanya kesamaan identitas kolektif yang kuat
Gerakan sosial memiliki reputasi sebagai aktor yang penting dalam isu politik nasional. Dalam hal ini gerakan harus dapat memperhatikan isu-isu lainnya, tidak boleh hanya untuk kepentingan konstituennya saja	Hubungan yang kuat dalam organisasi antara anggota (<i>grassroots</i>) dengan pemimpin gerakan
	Keberhasilan dalam merespons sumber daya masyarakat

Sumber: Telah diolah kembali dari Collins (2006, 54-55).

Komponen yang terdapat pada sumber daya kekuatan eksternal merupakan komponen yang menentukan kemampuan gerakan sosial untuk dapat memperoleh dukungan massa alternatif, dalam arti bukan hanya dari basis gerakan saja (Collins 2006, 53). Menurut Collins, agar gerakan sosial berhasil dalam kompetisi elektoral maka diperlukan organisasi gerakan sosial skala nasional, organisasi dan pemimpinnya diakui secara nasional, dan gerakan harus dapat membentuk dirinya sebagai aktor yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu skala nasional yang ditujukan untuk menunjukkan jika mereka memiliki kesamaan visi politik dan agenda dengan masyarakat secara luas. Semua hal tersebut dibutuhkan agar dapat memiliki suara dukungan dari pemilih.

Kemudian terkait sumber daya internal, dibutuhkan gerakan sosial yang otonom supaya ketika partai gerakan berhadapan dengan negara dan partai politik, maka mereka tidak memberikan pengaruhnya dengan menjauhkan gerakan sosial dengan partai yang terbentuk. Selain itu, gerakan sosial harus dapat membentuk kesamaan identitas kolektif yang kuat, identitas yang menguntungkan mereka dalam kompetisi elektoral dan hal ini dapat dilihat dari sejarah pembentukan mereka. Dibutuhkan pula struktur organisasi yang baik, yang kunci utamanya yaitu akuntabilitas dan komunikasi antara pemimpin gerakan dan anggotanya (*ibid*, 59-60). Setidaknya, terdapat tiga kemampuan organisasi yang harus dimiliki gerakan yaitu hubungan yang kuat dan komunikasi yang sejalan antara pemimpin dan anggota, pemimpin yang akuntabel

dan dapat mencegah monopoli kepemimpinan, serta dapat menyelesaikan konflik internal yang terjadi (*ibid*, 66). Dan terakhir, kemampuan partai gerakan untuk dapat merespons kebutuhan material masyarakat agar dapat menawarkan gagasan yang berbeda dengan partai politik lainnya. Dengan begitu, partai gerakan akan mendapat dukungan tidak hanya dari konstituennya saja, tetapi dari masyarakat secara luas.

Komponen mobilisasi sumber daya kekuatan eksternal dan internal ini dapat dimaknai bahwa untuk menganalisis kesuksesan partai gerakan sosial dalam politik elektoral ini tidak hanya ditentukan oleh faktor struktur kesempatan politik saja. Sebagaimana hasil studi Collins, bahwa mobilisasi sumber daya ini menjadi komponen yang mendukung gerakan sosial untuk menghadapi hambatan pada struktur kesempatan politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan partai gerakan adat di Ekuador yang lebih dahulu berhasil dibandingkan dengan partai gerakan adat di Bolivia, padahal keduanya memiliki kesamaan dalam kesempatan politik. Meskipun Collins menggunakan pengalaman gerakan adat di Amerika Latin untuk membangun kerangka teoritis partai gerakan sosial, penulis melihat bahwa gerakan buruh juga tergolong sebagai gerakan sosial. Karenanya, meskipun terdapat beberapa perbedaan antara gerakan adat dan gerakan buruh, namun hal tersebut tidak menjadikan bahwa kerangka teoritis partai gerakan sosial ini tidak dapat diaplikasikan untuk menganalisis partai buruh. Pemikiran Collins mengenai partai gerakan sosial ini dapat diaplikasikan pada studi kasus penelitian ini karena penelitian ini juga ditujukan untuk melihat apakah strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan dapat efektif, dan juga menganalisis mengapa kondisi tersebut dapat terjadi.

Untuk mengetahui bagaimana struktur kesempatan politik yang dimiliki gerakan buruh Korea Selatan ini akan dilihat dari sejumlah persoalan yang terkait dengan perpolitikan Korea Selatan, yakni perihal regionalisme, National Security Law dan neoliberalisme. Pembahasan regionalisme ini menjadi penting untuk dianalisis karena sangat terkait dengan persoalan volatilitas politik Korea Selatan. Selain itu juga akan dianalisis mengenai perihal keberadaan National Security Law di era demokrasi karena persoalan yang sangat terkait dengan kebebasan bagi

seluruh elemen masyarakat dalam berpolitik. Lalu, pada aspek konteks struktur ekonomi dan politik di Korea Selatan, akan dilihat melalui perubahan model pembangunan ekonomi yang diimplementasikan oleh Korea Selatan yang dalam hal ini akan fokus pada perubahan kebijakan ekonomi pemerintah pasca tahun 1997. Dari pembahasan ketiga aspek tersebut, nantinya akan memperlihatkan apakah struktur kesempatan politik yang dimiliki gerakan buruh Korea Selatan menguntungkan mereka atau tidak.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana mobilisasi sumber daya gerakan buruh Korea Selatan, dapat dilihat dari struktur internal organisasi KCTU dan FKTU serta partai buruh. Selain itu juga dilihat sumber daya lainnya seperti ideologi gerakan dan partai buruh, program agenda kebijakan mereka dan rekam jejak mereka dalam mengartikulasikan program mereka. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana mobilisasi sumber daya gerakan buruh Korea Selatan yang kemudian diklasifikasikan kedalam aspek sumber daya kekuatan eksternal dan juga internal. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bagaimana mobilisasi sumber daya gerakan buruh Korea Selatan khususnya pada era demokrasi.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang mengutamakan pada intepretasi atau pemaknaan dari peneliti pada data yang diperoleh (Creswell 2010, 261-263). Terkait dengan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat penelitian eksplanatif karena penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan dua aspek dari suatu fenomena (Kumar 2011, 31-32), yakni gerakan buruh dan politik elektoral. Kemudian jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus karena penelitian ini fokus kasus yang menjadi topik permasalahan dibatasi oleh rentan waktu tertentu (Kumar 2011, 96). Pemilihan periode tahun 2004-2014 dikarenakan pada periode tersebut menjadi titik momentum untuk pertama kalinya gerakan buruh memiliki representasi

dalam parlemen, hingga dibubarkannya UPP oleh pemerintah pada tahun 2014.

Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait suatu fenomena sosial yang diamati dengan bersumber pada penelitian sebelumnya yang memiliki data yang relevan, rekaman pribadi seperti buku harian, media massa seperti artikel berita online, dan data publikasi pemerintah yang dalam penelitian ini seperti laporan hasil pemilihan umum (Kumar 2011, 156). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data yang terkait kajian perburuhan di Korea Selatan. Lalu peneliti juga melakukan wawancara melalui *e-mail* dengan Junghee Ryu, representasi juru bicara dari *Labor Party*, di mana hasil wawancara ini digunakan untuk mengkonfirmasi temuan data sekunder sebelumnya yang digunakan penulis dalam analisis pembahasan. Wawancara melalui *e-mail* dilakukan mengingat adanya keterbatasan terkait waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan interpretasi data dan juga melakukan kategorisasi dari sumber data sekunder yang telah diperoleh kedalam tema-tema yang telah dibuat.

PERSOALAN VOLATILITAS POLITIK DI KOREA SELATAN

Era demokrasi di Korea Selatan faktanya masih menghadapi persoalan yang tidak terlepas dari tatanan politik pada rezim sebelumnya. Persoalan tersebut seperti perihal sistem kepartaian dan juga pemilihan umum yang kemudian menyebabkan volatilitas politik di Korea Selatan tergolong lemah. Sistem kepartaian di Korea Selatan tergolong masih mengalami instabilitas karena masih adanya kepentingan personal atau individu yang terpilih, masih adanya pengaruh politik regionalisme, model pemilihan umum sistem campuran yang masih membatasi munculnya partai-partai kecil dalam kompetisi elektoral dan masih adanya pengaruh kepentingan Amerika Serikat yang turut memengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini misalnya terkait perihal Korea Utara (Bailey 2010, 43-46). Terkait persoalan volatilitas politik di Korea

Selatan, masalah regionalisme tentu merugikan buruh dalam kompetisi elektoral. Kekalahan PV21 yang diketuai oleh ketua KCTU saat itu yakni Kwon Young-Khil pada tahun 1997, serta kekalahan KDLP pada pemilihan umum parlemen nasional tahun 2000 dapat dikatakan juga sebagai akibat dari persoalan regionalisme. Adanya regionalisme yang berkembang dalam politik Korea Selatan, membuat buruh harus dapat melawan dominasi-dominasi partai yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan, masalah terkait sistem kepartaian dan pemilihan umum tersebut merupakan persoalan yang tidak mudah bagi partai gerakan sosial karena seperti menurut Collins bahwa mereka sendiri cenderung masih lemah secara finansial.

Pemerintah telah berupaya mengatasi regionalisme dalam politik Korea Selatan dengan melakukan amandemen undang-undang pemilihan umum. Sejak tahun 2004 sistem pemilihan umum Korea Selatan yang semula menerapkan model pemilihan *single-member electoral system* atau memilih berdasarkan sistem distrik saja, kemudian menjadi *two vote mixed system*, yakni juga disertai dengan adanya sistem proporsional (Lee dan Lim 2006, 317-318). Menurut Lee dan Lim (2006) adanya amandemen ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan KDLP dalam pemilihan umum parlemen nasional tahun. Meskipun demikian, model sistem pemilihan campuran seperti itu sebenarnya masih turut membatasi partai-partai baru untuk tampil melawan dominasi perolehan suara dari partai-partai yang telah ada sebelumnya. Dapat dilihat bagaimana partai konservatif dan partai liberal selalu tampil menjadi dua partai yang mendominasi politik Korea Selatan sejak lama. Akibatnya, partai buruh sebagai partai baru pun hanya sebatas menjadi partai minoritas. Dengan masih adanya masalah regionalisme dan model sistem pemilihan umum yang ada, tentu menghambat partai buruh sebagai partai baru untuk dapat melawan dominasi partai-partai yang telah ada sebelumnya.

PERDEBATAN NATIONAL SECURITY LAW DAN DEMOKRASI DI KOREA SELATAN

Pasca tahun 1987, kita dapat lihat bagaimana demokratisasi di Korea Selatan berkembang baik serta didukung dengan sejumlah program kebijakan presiden yang ditujukan untuk mendorong kebebasan masyarakat sipil. Sebagaimana menurut Su Hoon-Lee (1993), bahwa sejak era transisi demokrasi Korea Selatan yaitu tahun 1987-1992, kita dapat lihat adanya perubahan yang terjadi pada politik Korea Selatan. Perubahan tersebut dibuktikan dengan adanya liberalisasi atau rezim yang terbuka, aktivasi masyarakat sipil, dan melemahnya kapasitas negara untuk menghadapi situasi tertentu (Lee 1993, 365). Perubahan tersebut menjadi akses bagi gerakan buruh untuk masuk ke dalam institusi politik. Menurut Collins (2006) ketika sistem untuk masuk ke dalam institusi politik semakin terbuka, maka hal ini menjadi kesempatan bagi sebuah gerakan sosial dalam kompetisi elektoral. Namun pada kasus gerakan buruh di Korea Selatan nyatanya mereka belum sepenuhnya memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam politik.

Keberadaan National Security Law masih menjadi hambatan bagi kebebasan gerakan buruh, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. National Security Law menjadi salah satu bentuk kebijakan keamanan yang masih diwarnai dengan polemik tuntutan dari sejumlah masyarakat agar dihapus karena sarat akan disalahgunakan oleh kepentingan segelintir elite konservatif dan melanggar hak asasi (Kraft 2006, 628). Permasalahan dalam undang-undang ini yaitu pemberian sanksi bagi pihak yang termasuk simpatisan, pihak yang mendorong, serta pihak yang menyebarkan dan berkerjasama dengan mereka yang tergolong kelompok anti negara akan dikenai hukuman penjara (Kraft 2006, 629). Berkaca pada kasus keputusan pengadilan untuk membubarkan UPP pada tahun 2014 dan bagaimana pemerintahan rezim otoritarian menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kelompok oposisi, maka keberadaan peraturan tersebut jelas menghambat kebebasan ekspresi dalam berpolitik di Korea Selatan. Gerakan buruh tentu terancam dengan adanya undang-undang ini karena mereka dianggap sebagai gerakan radikal dan militan, yang kerap kali melakukan aksi

massa yang selalu diwarnai kericuhan. Gagasan ideologi sosialis mereka dianggap begitu kontras dengan ideologi yang dianut oleh Korea Selatan. Bahkan dalam tubuh gerakan buruh juga partai buruh diwarnai dengan adanya kelompok nasionalis kiri yang menginginkan adanya dialog untuk reunifikasi dengan Korea Utara. Partai buruh sebagai representasi partai kiri pun tentu sangat rentan akan sanksi dari undang-undang ini. alih-alih memberikan keamanan bagi masyarakat, keberadaan undang-undang ini justru mengancam kebebasan masyarakat sipil serta kelompok oposisi. Persoalan mengenai National Security Law yang menghambat demokrasi di Korea Selatan, membuat partai buruh tentu menjadi tidak mudah untuk membawa gagasan mereka dalam kontestasi politik Korea Selatan. Padahal, keberadaan partai buruh ini sangat penting untuk membawa representasi buruh dalam politik ditengah perpolitikan Korea Selatan yang didominasi oleh elit-elit dari partai politik yang telah ada sebelumnya.

STRUKTUR EKONOMI DAN POLITIK KOREA SELATAN PASCA TAHUN 1997: DARI *DEVELOPMENTAL* *STATE* MENJADI NEOLIBERALISME

Krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan pada tahun 1997, menjadi titik momentum perubahan struktur ekonomi dan politik Korea Selatan yang semula menerapkan model *developmental state*, kemudian menerapkan model pembangunan neoliberalisme yang dibuktikan dengan adanya restrukturisasi sektor keuangan, korporasi serta pasar tenaga kerja (Pirie 2008, 10). Restrukturisasi ini membuat adanya perubahan hubungan antara negara dan kelompok *chaebol*, yang kemudian tampil menjadi aktor yang otonom. Sebelumnya, kesuksesan pembangunan ekonomi Korea Selatan tidak terlepas dari adanya peranan negara sebagai aktor dalam perekonomian yang sejalan dengan kebijakan *developmental state*, seperti kebijakan *Export Oriented Industrialisation* (EOI), dan pembentukan *economic Planning Board* (EPB) pada era kepemimpinan Park Chung Hee. Namun seiring dengan kesuksesan pembangunan ekonomi, desakan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis juga semakin menguat. Kondisi ini sebenarnya sangat

terkait dengan perkembangan kelompok kelas menengah, yang kemudian mulai tampil menjadi aktor yang otonom dan kemudian menarik dukungannya terhadap gerakan buruh pasca koalisi mereka dalam aksi tahun 1987 (Jee 2007, 137).

Selain itu model *developmental state* kemudian juga dihadapi dengan perkembangan globalisasi. Hal tersebut menjadi tantangan karena ada tuntutan bagi seluruh aktor yang menjadi bagian dalam proses sosial (individu, masyarakat dan negara) untuk mengadopsi serta beradaptasi dengan standar global dengan mengikuti norma-norma yang telah disepakati secara global dan dituntut untuk meningkatkan daya saing internasional melalui kompetisi yang tidak mengenal batasan wilayah (Winanti 2003, 182). Di satu sisi, era demokrasi menuntut adanya liberalisasi baik secara ekonomi dan juga dalam politik. Hal ini kontras dengan model *developmental state*, khususnya yang terjadi di Korea Selatan. Oleh karena itu, negara tidak lagi diharapkan untuk melakukan proteksi terhadap perekonomiannya, sebagaimana kebijakan *developmental state* yang digagas oleh Park Chung Hee.

Dampak restrukturisasi kebijakan ekonomi neoliberalisme bagi buruh Korea Selatan ini menurut Jung Young Tae menyebabkan pengangguran semakin meningkat karena mekanisme perekrutan kerja tidak tetap, ketidakamanan kerja, serta menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata, atau timpang (Tae 2000, 269). Persoalan tersebut kemudian menurutnya berakibat pada lemahnya kapasitas organisasional kelas pekerja, serta menyebabkan mereka jadi fokus lagi pada sebatas masalah keamanan kerja, ekonomi dan kondisi kerja, sehingga menghilangkan peranan mereka untuk terlibat aktif dalam proses *deepening democracy* (Tae 2000, 270). Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah ini juga telah membentuk divisi kelas pekerja dan pembelahan sosial di Korea Selatan semakin beragam (Jee 2007, 137-138). Jika mengacu pada dimensi pembagian kesadaran kelas menurut Jee (2007, 139), bahwa di Korea Selatan terdapat dua kelas yakni kelompok Anti Bisnis dan kelompok Bisnis Besar. Ketidakmungkinan kelompok Bisnis Besar untuk bergantung lagi dengan negara, membuat mereka memanfaatkan *Federation of Korean Industries* (FKI) untuk

melakukan *lobby* dan mereka pun turut diuntungkan dengan adanya pembentukan partai koalisi konservatif pada tahun 1990-an (Jee 2007, 139-140).

Momentum pasca krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik perubahan kebijakan ekonomi Korea Selatan. Di saat yang bersamaan, negara ini juga sedang dalam proses *deepening democracy* (Lee dan Lim 2006, 309), dan di sisi lain juga sedang berupaya untuk melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat sipil dalam proses politik. Dapat dilihat bagaimana kebijakan restrukturisasi ekonomi Kim Dae Jung (1998-2003) yang tetap berupaya mengakomodir kelompok buruh melalui pembentukan komisi tripartit. Padahal kondisi krisis ekonomi yang dihadapi Korea Selatan serta tantangan globalisasi yang juga tengah dihadapi, tentu menjadi hal yang sulit bagi pemerintah untuk dapat merealisasikan desakan buruh yang menentang restrukturisasi ekonomi yang menekankan pada pengurangan intervensi negara melalui fleksibilitas pasar. Lalu, Presiden Roh Moo Hyun (2003-2008) dalam kampanyenya juga kembali berupaya mewujudkan gagasan reformasi sosial dengan melibatkan representasi buruh dan aktivis sosial lainnya ke dalam komite persiapan agenda kebijakan reformasi sosial yang digagasnya (Lee & Lim 2006, 327). Namun ketika ia terpilih kemudian ia sendiri tidak mampu mewujudkan gagasannya tersebut (Kim 2007, 364). Dari kedua era kepemimpinan presiden yang berasal dari partai liberal tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka pun pada akhirnya menjalankan ekonomi yang sejalan dengan agenda restrukturisasi, meskipun bila dilihat dalam hubungan industrial pada era Roh Moo Hyun pemerintah tergolong lebih pro dengan kepentingan kelompok buruh atau dapat dikatakan lebih memfasilitasi mobilisasi sumber daya buruh dan memberikan mereka partisipasi yang lebih dibandingkan era Kim Dae Jung (Lee & Lim 2006, 327). Pada era kepemimpinan Roh Moo Hyun pemerintah kembali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara buruh dan pengusaha, hal yang berbeda pada saat era kepemimpinan Kim Dae Jung (ibid, 324-325).

Hal yang bertolak belakang terlihat pada pengalaman gerakan buruh di bawah kepemimpinan Lee Myung Bak (2008-2013) dan Park

Geun Hye (2013-2017) yang memperlihatkan bagaimana gerakan buruh dan partai buruh sulit untuk membawa atau pun mewujudkan program partai mereka ke dalam parlemen. Sebagai kandidat yang berasal dari partai konservatif, kemenangan mereka sebagai presiden dan dominasi anggota partai mereka dalam parlemen semakin menyulitkan partai buruh dalam membangun aliansi. Terlebih, partai konservatif ini seringkali membawa kebijakan ekonomi yang mengabaikan kepentingan buruh. Dan hal ini dibuktikan ketika Lee Myung Bak menganggap aktivitas demonstrasi dan mogok kerja buruh sebagai aktivitas yang ilegal. Lee Myung Bak sendiri bahkan membuat kebijakan ekonomi yang pro pengusaha besar seperti deregulasi pajak yang membuat pengusaha mendapatkan untung lebih banyak dan mengadopsi kebijakan yang menekan kebebasan aksi mogok gerakan buruh (Shin 2012, 304). Kontestasi politik Korea Selatan, khususnya pada tahun 2004-2014 memperlihatkan bahwa tidak adanya aktor politik yang potensial untuk dapat mendukung kesuksesan partai buruh di Korea Selatan. Padahal dengan kondisi peta kekuatan politik di Korea Selatan yang seperti itu tentu menjadi penting bagi gerakan buruh untuk dapat memiliki aliansi. Dari perubahan kondisi struktur kelas ini, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan ekonomi politik Korea Selatan pasca penanganan krisis ekonomi tahun 1997, nyatanya belum menjadi kesempatan bagi buruh untuk tampil menjadi kekuatan politik baru melawan dominasi dari kelompok konservatif yang didukung oleh kelompok Bisnis Besar.

PERSOALAN MOBILISASI SUMBER DAYA KEKUATAN EKSTERNAL GERAKAN BURUH KOREA SELATAN

Konsepsi mengenai sumber daya kekuatan eksternal gerakan sosial yang dibutuhkan dalam kompetisi politik elektoral, yakni sejumlah komponen yang dibutuhkan gerakan sosial untuk mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat (Collins 2006, 53). Sejumlah komponen tersebut yaitu pembentukan organisasi gerakan sosial skala nasional, eksistensi gerakan dalam masyarakat terkait pengakuan gerakan dan pemimpinnya, serta gerakan sosial harus menunjukkan visi dan agenda politik mereka ke masyarakat bahwa mereka memiliki. Pada

kasus gerakan buruh Korea Selatan, dapat dilihat bahwa buruh memiliki representasi organisasi gerakan skala nasional melalui keberadaan FKTU dan KCTU. Adanya dua payung organisasi gerakan buruh skala nasional ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan organisasi gerakan buruh di Korea Selatan. Mulanya, representasi organisasi gerakan buruh hanya direpresentasikan oleh FKTU. FKTU sendiri merupakan organisasi buruh yang dibentuk oleh pemerintahan rezim otoritarian Park Chung Hee. Tidak mengherankan jika kemudian keberadaannya dikooptasi oleh pemerintah yang berkuasa. Sikap FKTU pun cenderung lebih mendukung kebijakan pemerintah yang sebenarnya bertentangan dengan perlindungan hak-hak buruh. Bersamaan dengan jaminan kebebasan berorganisasi bagi seluruh elemen masyarakat sipil, lalu kelompok buruh lainnya untuk membentuk organisasi buruh yang independen yakni KCTU.

Keberadaan KCTU sebagai organisasi buruh yang akar rumput, mendorong FKTU untuk melakukan reformasi dalam internal organisasi mereka (Choi 2006, 54). Keputusan FKTU tersebut tidak terlepas dari statusnya sebagai *legacy union* yaitu bahwa organisasi serikat yang dibentuk pemerintah saat era rezim otoritarian akan tetap berupaya bertahan untuk mempertahankan pengaruhnya pada era demokrasi dengan melakukan reformasi dalam internal gerakan (Maydom, Gatto dan Fedorowycz 2014, 19). Hal tersebut sangat mungkin memang terjadi karena pada era demokrasi, mereka memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Perubahan FKTU juga dapat dilihat dengan keikutsertaannya pada aksi demonstrasi tahun 1996 yang mendesak pemerintahan Kim Young Sam agar segera melegalkan KCTU sebagai organisasi gerakan buruh tingkat nasional dan pada aksi kolektif buruh dalam menentang kebijakan ekonomi Kim Dae Jung untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997. Sejak ditetapkannya FKTU dan KCTU sebagai payung organisasi buruh skala nasional, sejak saat itu pula keduanya menjadi aktor utama yang merepresentasikan gerakan buruh.

KCTU dan FKTU serta pemimpinya pun tergolong sudah diakui secara nasional. Keduanya pun bahkan menjadi organisasi yang dipercaya untuk mewakili buruh dalam komisi tripartit dan juga men-

jadi motor penggerak aksi buruh. Kinerja mereka tentu berpengaruh terhadap partai yang dibentuk oleh organisasi buruh. Data per tahun 2014 menunjukkan jumlah anggota FKTU yakni 843,173 anggota, sedangkan anggota KCTU mencapai 631,415 anggota (MOEL 2014). Dipilihnya Kwon Young Khil, yang merupakan ketua KCTU kemudian dipilih menjadi ketua KDLP, tentu membuktikan bahwa adanya pengakuan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi buruh dalam politik. Namun, sejak terjadinya faksi-faksi baik dalam organisasi dan internal partai, persoalan tersebut nampaknya turut berpengaruh terhadap eksistensi gerakan buruh.

Gerakan buruh Korea Selatan pada dasarnya tidak hanya menjadikan isu ekonomi yang menjadi masalah bagi buruh saja. Organisasi gerakan buruh Korea Selatan juga turut serta berupaya membawa isu-isu politik yang menjadi masalah Korea Selatan juga. Hal ini seperti yang dicantumkan pada pernyataan KCTU bahwa basis gerakan KCTU selain perihal terkait persoalan buruh, mereka juga menyatakan sebagai gerakan sosial untuk demokrasi, reformasi sosial untuk masyarakat sipil dan berupaya membangun kekuatan politik baru di Korea Selatan. Gagasan ini kemudian dapat dikaitkan dengan kesuksesan KDLP pada pemilihan umum parlemen nasional tahun 2004. Keberhasilan KDLP sebagai partai buruh yang terpilih dalam pemilihan umum yang demokratis, tentu membuktikan adanya kepercayaan terhadap partai buruh untuk dapat membawa perubahan bagi Korea Selatan. Namun, dampak dari perubahan struktur ekonomi politik Korea Selatan khususnya pasca tahun 1997 secara tidak langsung menyebabkan kapasitas mereka menjadi lemah. Gerakan buruh Korea Selatan kemudian menjadi fokus pada masalah ekonomi khususnya yang terkait dengan persoalan buruh saja.

Partai buruh Korea Selatan sempat aktif dalam mengawal isu-isu lainnya seperti pada tahun 2002 ketika partai yang dibentuk KCTU dan FKTU turut aktif mengadvokasikan amandemen undang-undang pemilihan umum. Selain itu juga, pada tahun 2004 terlihat bahwa aksi kolektif buruh mulai bergerak ke isu sosial politik lainnya terkait respons terhadap Perang Irak, isu reunifikasi Korea Utara, desakan untuk

pendanaan donasi sosial oleh pebisnis, dan amandemen National Security Law (Lee & Lim 2006, 330). Akan tetapi sebagaimana menurut Lee dan Lim (2006) bahwa hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan partai buruh di Korea Selatan. Persoalan baru muncul sebagai dampak dari penanganan krisis ekonomi 1997 yang menuntut fleksibilitas pasar tenaga kerja. Perubahan hubungan industrial pun menyebabkan intervensi negara berkurang, sehingga seperti menurut Nugrahen (2015, 57) bahwa adanya perubahan *bargaining position* buruh sebagai implikasi dari kesepakatan penanganan krisis ekonomi tahun 1997 dengan IMF yang juga berpengaruh terhadap kebijakan perburuhan yang merugikan buruh. Hal tersebut membuat eksistensi organisasi gerakan buruh Korea Selatan serta pemimpinnya dalam skala nasional juga menjadi sulit untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas. Lalu, masih terdapat pula anggapan jika FKTU dipandang cenderung lebih pro dengan kebijakan pemerintah (Ryu, wawancara *e-mail* pada 12 Juni 2017). Akan tetapi menurut penulis hal tersebut lebih dikarenakan status FKTU sebagai *legacy union*, sehingga sulit untuk melepas citra tersebut. Terlebih kemudian adanya fakta bahwa pada pemilihan umum tahun 2004 bahwa anggota FKTU memilih KDLP dan juga adanya kesamaan sikap FKTU dan KCTU pada beberapa isu, nampaknya anggapan tersebut tidak menjadi persoalan yang cukup berarti bagi kinerja partai buruh.

Reputasi partai buruh yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan kelompok buruh juga tidak terlepas dari adanya masalah faksi-faksi dalam internal partai buruh. Pada kasus KDLP misalnya, KCTU yang merupakan penggagas dari pembentukan partai buruh ini justru dalam perkembangannya kemudian tidak memiliki pengaruh dalam partai. Hal ini kemudian dibuktikan dengan akhir perjuangan KDLP yang kemudian fokus hanya pada masalah reunifikasi Korea Utara. Persoalan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pada KDLP dalam persiapan pemilihan umum tahun 2004 dan setelahnya. Kegagalan KDLP pada pemilihan umum parlemen nasional tahun 2000 membuat KDLP kemudian berupaya untuk fokus untuk menggabungkan buruh dan petani dalam melawan kapitalisme, melakukan

pengorganisasian gerakan untuk melakukan reunifikasi Korea Utara dan mengurangi kontrol pengaruh Amerika Serikat, melindungi usaha mikro, kecil dan menengah, serta mengkampanyekan perubahan dalam sistem pemilihan umum (Byung Ho, dalam Pidato 2004). Namun sebagai akibat dominasi kelompok nasionalis kiri dalam internal KDLP membuat partai ini kemudian fokus dengan isu reunifikasi Korea Utara. Akibatnya, gagasan sosialisme demokrat yang diusung dalam pemilihan umum belum mampu diimplementasikan. Gerakan buruh pun pada akhirnya terbilang belum menjadi aktor yang cukup signifikan dalam membawa kepentingan masyarakat sipil lainnya, sehingga mereka pun belum dapat memperluas basis dukungan mereka.

PERSOALAN MOBILISASI SUMBER DAYA KEKUATAN INTERNAL GERAKAN BURUH KOREA SELATAN

Organisasi gerakan buruh Korea Selatan tergolong sebagai organisasi yang otonom. Meskipun FKTU dibentuk oleh pemerintah era rezim otoritarian, namun pasca tahun 1987 menunjukkan adanya gejala perubahan untuk menjadi organisasi buruh yang independen. Kesadaran untuk melakukan pembaruan internal dalam FKTU dikarenakan mereka sadar akan kritik dari masyarakat terhadap FKTU pasca tahun 1987 yang mengancam posisi mereka sebagai satu-satunya federasi nasional yang legal (Choi 2006, 54). Kemudian dengan sejarah pembentukan KCTU serta reputasinya sebagai organisasi buruh yang akar rumput, membuktikan bahwa memang organisasi buruh Korea Selatan independen. Menjadi sangat penting bagi sebuah gerakan agar otonom atau mandiri, dalam arti tidak ada pengaruh atau pun berada dalam kontrol negara dan partai politik (Collins 2006). Hal ini dibutuhkan agar gerakan buruh dapat bebas membawa kepentingan mereka sendiri serta tidak mudah diarahkan oleh aktor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada aksi kolektif buruh dalam memprotes kebijakan pemerintah. Seperti ketika mereka terlibat dalam mendesak desakan amandemen undang-undang pemilihan umum pada tahun 2004 dan upaya mendorong amandemen National Security Law. Selain itu dapat dilihat juga saat partai buruh bergabung dengan aksi *candlelight* bersama masyarakat sipil lainnya

dalam memprotes kebijakan impor daging sapi Amerika Serikat tahun 2008 (Oh 2012) dan sikap KCTU, FKTU dan partai buruh dalam menentang rencana pemerintah pada tahun 2014 yang akan melakukan amandemen undang-undang perburuhan yang merugikan buruh (Lee 2015). Dari kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa partai buruh di Korea Selatan bersifat otonom. Namun, hal tersebut tidak cukup menjamin bagi keberlanjutan partai buruh setelahnya.

Pada komponen identitas, struktur internal dan sumber daya material gerakan buruh Korea Selatan terdapat sejumlah persoalan yang kemudian menyebabkan strategi politik elektoral mereka pasca tahun 2004 kemudian belum dapat efektif. Agar gerakan dapat berhasil dalam kompetisi elektoral, dibutuhkan adanya kesamaan identitas yang kuat dan identitas yang menguntungkan gerakan sosial (Collins 2006). Identitas kolektif gerakan buruh Korea Selatan bersandarkan pada gagasan ideologi sosialisme demokrat. Ketika mereka membentuk partai pun partai buruh menjadi representasi dari partai kelompok kiri di Korea Selatan. Namun, dalam perkembangannya pasca tahun 2004, faksi-faksi yang terjadi dalam internal gerakan buruh dan partai menyebabkan partai pada akhirnya didominasi oleh kelompok faksi radikal sosialis. Sedangkan, jika kita melihat struktur kesempatan politik Korea Selatan, tentu gagasan ini dianggap tidak relevan bagi elemen kelompok masyarakat lainnya. Gerakan buruh harus dapat membangun atau membentuk identitas yang menguntungkan mereka dalam arena politik elektoral atau identitas mereka haruslah bersifat inklusif agar mereka mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat sipil lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengalaman gerakan adat di Amerika Latin harus memiliki identitas yang kuat, di mana dapat dilihat melalui sejarah pembentukan mereka (ibid, 56). Dari penjelasan Collins (ibid, 57), dapat dipahami bahwa meskipun sebuah gerakan memiliki identitas “primordial” atau identitas yang menjadi dasar gerakan mereka, namun mereka harus bisa juga membangun identitas baru yang ditujukan untuk dapat memperluas dukungan dan membuat program kebijakan yang menjadi representasi kepentingan kelompok lainnya.

Menurut Kim (2012) bahwa pada kasus Korea Selatan secara ekonomi negara tersebut memang diuntungkan dengan sistem kapitalisme, sehingga menjadi tantangan bagi KDLP yang mengusung gagasan sosialisme. Upaya mereka dalam mewujudkan program kebijakan mereka juga dibatasi oleh dominasi partai-partai lainnya di parlemen. Konsekuensi dari posisi partai buruh sebagai partai minoritas membuat mereka harus dapat membangun aliansi dalam parlemen. Sedangkan, di dalam parlemen juga didominasi oleh partai konservatif dan partai liberal. Belum lagi dalam internal gerakan buruh dan partai juga kemudian didominasi oleh kepentingan kelompok sosialis radikal yang didukung oleh kelompok nasionalis kiri (Kim 2012, 203). Dominasi faksi *National Liberation* yang didukung oleh kelompok sosialis radikal di satu sisi menyebabkan KDLP pada akhirnya kemudian menjadi fokus pada isu masalah reunifikasi Korea Utara saja. Sedangkan, di satu sisi lain, adanya implementasi dari kebijakan National Security Law yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dalam politik, tentu membuat mereka harus berhati-hati dalam menyusun strategi politik mereka. Skandal UPP pada tahun 2014, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi gerakan buruh dalam menyusun strategi politik mereka. Terlebih jika kita membandingkan kekalahan parta sosialis di Korea Selatan yang muncul pada era demokrasi (1987-1999), bahwa kekalahan tersebut dipengaruhi oleh dominasi kelompok nasionalis kiri yang mendukung gagasan *marxist-lenin* (Kim 2012, 198).

Melihat kesuksesan *Britain Labor Party* (BLP) yang dapat memenangkan pemilihan umum pada tahun 1997 setelah sebelumnya parlemen Inggris dikuasai Partai Konservatif, hal tersebut dapat dimaknai juga tidak terlepas dari keberhasilan partai dalam melakukan pembaharuan dalam internal partai. Tony Blair ketika menjabat sebagai ketua BLP memutuskan untuk mentransformasi partai melalui amandemen *Clause IV*, sehingga sejak saat itu terjadi pergeseran dari *Old Labor Party* menjadi *New Labor Party*. Hal tersebut turut terjadi juga pada Partai Sosialis Demokrat di Jerman yang berada pada situasi ekonomi dan politik yang sama dengan Inggris, sehingga di bawah kepemimpinan Schroder juga melakukan reformasi internal partai

menjadi kiri-tengah. Transformasi tersebut mengacu pada hasil studi Kleden (2004) dikarenakan dalam internal partai terdapat kelompok reformis yang menyadari pentingnya untuk memperbaharui ideologi partai. Selain itu juga, dapat dilihat bahwa adanya perubahan konstelasi ekonomi dan politik global yang menuntut liberalisasi ekonomi. Dari kasus tersebut dapat dimaknai bahwa pentingnya peran ideologi yang menjadi identitas partai untuk dapat mendukung keberhasilan partai dalam kompetisi politik elektoral. Mengingat seharusnya ketika sebuah gerakan membentuk partai, maka mereka harus juga memperhatikan apa yang menjadi kepentingan bagi kelompok masyarakat secara luas, bukan hanya basis massanya saja.

Mengacu pada tulisan Kim (2012), kegagalan transformasi partai buruh dari partai radikal sosialis menjadi partai sosialisme demokrat telah menyebabkan partai buruh di Korea Selatan harus menghadapi kegagalan. Maka, menjadi penting bagi partai buruh Korea Selatan untuk dapat melakukan pembaharuan ideologi mereka di mana hal tersebut tidak hanya ditujukan agar dapat memenangkan kursi parlemen saja, tetapi juga untuk dapat menjangkau isu yang menjadi kepentingan masyarakat sipil lainnya serta sejalan dengan persoalan kesempatan politik yang mereka hadapi. Terlebih pengalaman partai buruh di Korea Selatan memperlihatkan bahwa meskipun KDLP merupakan partai buruh yang membawa perjuangan demokrasi bagi kelas pekerja. Namun faktanya partai ini kemudian dalam perkembangannya justru didominasi oleh kelompok radikal sosialis yang didukung oleh kelompok nasionalis kiri (Kim 2012, 203-204), sehingga gagasan sosialisme demokrat yang menjadi identitas dari gerakan buruh ini terlihat dikesampingkan. Dibutuhkan kesamaan identitas antara partai dan gerakan di mana identitas tersebut juga dapat merepresentasikan identitas dari kelompok lainnya (Collins 206, 465-466).

Selain itu adanya perubahan struktur ekonomi dan politik Korea Selatan membuat partai buruh tidak hanya dapat mengandalkan basis buruh pabrik saja. Kondisi tersebut sama halnya dengan kondisi situasi yang dihadapi oleh partai buruh di Inggris pada tahun 1997 dan juga partai sosialisme demokrat di Jerman. Mereka harus dapat dukungan

dari elemen kelompok masyarakat sipil lainnya dan membangun aliansi dengan partai tengah, dalam hal ini yakni partai liberal. Oleh karena itu, selama transformasi tersebut tetap dapat mengakomodir kepentingan buruh yang didukung dengan mempertahankan hubungan organik antara partai dan organisasi gerakan buruh, serta memberikan peluang bagi partai untuk memperluas basis dukungan, maka transformasi tersebut kiranya tidak mengancam identitas partai. Perubahan tersebut tidak serta merta menandakan bahwa Partai Buruh mendukung neoliberalisme karena menurut Giddens (2000, 51-52) bahwa perdebatan antara kiri dan kanan tetap ada dan diwujudkan dengan pandangan berbeda dari kelompok sosial demokrat yang tetap mendorong peningkatan kesejahteraan, sedangkan kelompok neoliberal memberikan dukungan yang minimal terhadap kesejahteraan.

Ketidakefektifan strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 juga memperlihatkan bahwa adanya permasalahan dalam struktur internal gerakan buruh dan juga partainya. Dalam internal pengorganisasian gerakan buruh misalnya, jika dibandingkan internal organisasi KCTU dan FKTU, maka KCTU tergolong lebih demokratis dibandingkan FKTU. KCTU tergolong mengadopsi model demokrasi partisipatoris, sedangkan organisasi FKTU lebih bersifat hierarki atau sejalan dengan konsep demokrasi prosedural (Choi 2006, 155). Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan partai oleh FKTU yang tergolong singkat serta tanpa melalui kongres, sedangkan KCTU dalam membentuk KDLP melalui rangkaian kongres yang panjang (ibid, 89). Bahkan diketahui bahwa terdapat sejumlah anggota FKTU yang lebih mendukung KDLP saat itu, dan juga FKTU dirasa belum merepresentasikan kepentingan serikat lokal (ibid, 248), sehingga melihat kesuksesan partai yang dibentuk KCTU tersebut membuktikan bahwa dengan organisasi yang demokratis mereka dapat berhasil dalam politik elektoral. Karena hanya dengan model organisasi yang demokratis, hubungan antara pemimpin dan anggotanya dapat berjalan dengan komunikatif sehingga gerakan pun dapat menjadi organisasi gerakan yang sifatnya akar rumput (Collins 2006, 58-59). Hal tersebut dapat berpengaruh untuk mendapatkan dukungan bagi partai gerakan sosial.

Kesuksesan struktur internal organisasi tidak hanya dilihat dari aspek relasi jalinan adanya komunikasi antara pemimpin dan anggotanya saja, tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana kepemimpinan dan implementasi dari prinsip akuntabilitas. Persoalan faksi yang terjadi dalam organisasi dan berimplikasi pada partai dapat diartikan bahwa adanya persoalan dalam kepemimpinan. Faksi yang terjadi pada KCTU yaitu faksi *National Faction*, *the Central Faction*, dan *the Field Faction* menyebabkan buruh sulit menyatukan kepentingan kolektif mereka. (Lee *et,al* 2008, 130). Selain itu faksi-faksi yang terjadi dalam partai buruh pun juga tidak terlepas dari persoalan kepemimpinan yang ada pada internal buruh itu sendiri. Kwon Yong Khil yang merupakan pemimpin dari KCTU, justru ketika memimpin KDLP pasca tahun 2004 memilih untuk bergabung dalam faksi *National Liberation* dengan fokus memperjuangkan masalah reunifikasi Korea Utara dan anti Amerika (Hellman 2011, 45). Dibutuhkan kapabilitas seorang pemimpin organisasi untuk mengatasi konflik yang terjadi pada strategi politik gerakan sosial (Munck 1995, 608). Perihal faksi dalam internal partai buruh memang telah terjadi sejak lama. Adanya kelompok nasionalis kiri yang bergabung dengan gerakan buruh dan partai buruh menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi faksi dalam internal organisasi buruh. Namun, melihat konflik ini baru memuncak pada tahun 2008, maka dapat dikatakan bahwa sebelumnya pemimpin partai mengatasi persoalan internal partai sehingga tidak memicu terjadinya perpecahan. Adanya masalah kepemimpinan ini juga turut berpengaruh pada ketidakmampuan gerakan buruh untuk membangun jaringan. Selain itu, diperlukan pula konfigurasi antara aktor pemimpin gerakan dengan elite politik lainnya yang dimana hubungan ini tetap didasari dengan kepentingan gerakannya atau dalam hal ini gerakan buruh (Diani 1997, 140).

Persoalan terkait internal organisasi gerakan buruh Korea Selatan juga tidak terlepas dari struktur ekonomi dan politik yang ada. Hal tersebut turut pula berimplikasi terhadap perkembangan gerakan buruh Korea Selatan. Kebijakan reformasi ekonomi Kim Dae Jung (Shin 2012, 212) telah benar-benar mengubah struktur kelas pekerja di Korea

Selatan. Seperti perihal kebijakan fleksibilitas tenaga kerja misalnya, yang di antaranya memunculkan sistem perekrutan tenaga kerja kontrak atau tidak tetap tentu turut berpengaruh terhadap buruh yang berserikat. Konsekuensi dari adanya status pegawai kontrak ini menyebabkan fragmentasi dalam kelas pekerja, serta mengurangi solidaritas pekerja (Shin 2012, 213). Terlebih dalam organisasi gerakan buruh sendiri fokus pada isu-isu terkait pekerja tetap saja. KCTU dianggap kurang begitu fokus dengan masalah pekerja tidak tetap, padahal jumlahnya semakin bertambah (Ryu, Wawancara *E-mail* pada 12 Juni 2017). Tidak mengherankan jika kemudian jumlah buruh yang berserikat di Korea Selatan tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan gerakan buruh menjadi lemah dalam melawan kebijakan neoliberalisme (Shin 2012, 223).

Gerakan buruh Korea Selatan pada era demokrasi juga kemudian dihadapi oleh adanya skandal korupsi yang melanda organisasi buruh yang dimana hal tersebut menjadi ancaman bagi keberlanjutan partai buruh (Lee & Lim 2006, 328). Skandal korupsi yang melanda organisasi buruh ini menunjukkan bagaimana mereka tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi gerakan buruh. Dalam kaitannya dengan strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan, masalah skandal korupsi ini setidaknya dapat berpengaruh terhadap basis dukungan partai buruh dalam pemilihan umum. Dengan adanya persoalan tersebut turut berpengaruh terhadap upaya mereka dalam memperluas basis dukungan.

Dan terakhir, merujuk pada studi Collins (2006, 71) bahwa pentingnya untuk melihat rekam jejak gerakan sosial dalam merespon kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan konstituennya saja. Hal ini dikarenakan karakteristik partai gerakan yang secara ideologi dan juga sumber daya tidak terikat dalam relasi klientelistik, maka untuk mempertahankan basis massa, mereka harus menawarkan suatu hal yang lain di mana hal ini terkait dengan rekam jejak mereka dalam membawa kepentingan masyarakat (ibid, 72-73). Pada kasus gerakan buruh Korea Selatan kita bisa lihat bahwa pada awalnya gerakan buruh meskipun identitas mereka didasari identitas

kelas pekerja, tetapi mereka juga turut menyuarakan kepentingan masyarakat lainnya seperti masalah demokrasi dan reformasi sosial. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa gerakan buruh terlibat aktif dalam Pemberontakan Sipil Juni 1987, aksi menentang kebijakan penanganan krisis ekonomi tahun 1997. Kemudian bersama dengan partai buruh kemudian mereka juga terlibat aktif dalam mendorong amandemen undang-undang pemilihan umum dan *National Security Law* dan respon terhadap Perang Irak.

Namun pasca tahun 2004, gerakan buruh terlihat menjadi kembali fokus hanya dengan isu-isu tertentu, khususnya yang terkait dengan kepentingan buruh saja. Para pemimpin organisasi buruh belum mempertimbangkan masalah ekonomi nasional, mereka hanya lebih tertarik untuk memenangkan konflik faksi-faksi yang terjadi dalam serikat buruh (Lee, Chung & Jang 2008, 129). Sebagaimana menurut Collins (2006), bahwa seharusnya partai buruh terlibat dan juga fokus dalam isu-isu lainnya agar dapat memperluas basis dukungan pemilih partai gerakan. Isu reunifikasi Korea Utara memang tergolong sebagai isu nasional, namun berkaca pada pembubaran UPP pada tahun 2014 serta berkaca pada kegagalan partai-partai sosialis yang sebelumnya telah ada di Korea Selatan (Kim 2012), seharusnya mereka tidak terlalu fokus dengan isu ini. Mereka pun juga kini menghadapi kekuatan kelompok konservatif yang tentu membuat mereka sulit membawa isu tersebut. Dengan adanya faksi-faksi dalam internal organisasi gerakan buruh, tentu isu mengenai reunifikasi Korea Utara lebih dikarenakan kepentingan salah satu faksi, bukan kepentingan organisasi gerakan buruh secara menyeluruh sehingga mereka pun kurang mendapat dukungan masyarakat secara luas.

Selain itu, buruh juga kini menghadapi persoalan perubahan tatanan perekonomian global di mana pasar bebas membuat pengusaha dapat membuka perusahaan di negara lain tentu menjadikan posisi buruh lemah. Kondisi ini jelas menjadi dilema bagi gerakan buruh. Mereka menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja di mana wewenang tersebut kini dikuasai oleh pengusaha. Implikasi dari adopsi kebijakan neoliberalisme menyebabkan buruh berhadapan langsung

dengan pengusahan karena negara tidak lagi dapat aktif mengintervensi penyelesaian konflik antara buruh dengan pengusaha. Konsekuensi tersebut menyebabkan buruh menjadi tidak lagi leluasa dalam bertindak karena posisi mereka yang lemah dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (Nugrahen 2015, 35). Secara tidak langsung, fleksibilitas pasar tenaga kerja juga turut menyebabkan jumlah buruh yang berserikat cenderung menurun karena status pekerja yang kini tidak hanya status pekerja tetap saja, tetapi juga terdapat pekerja paruh waktu dan pekerja tidak tetap.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fragmentasi dalam kelas pekerja juga telah membuat mereka menjadi tidak lagi begitu militan dan menjadi abai dengan isu-isu sosial lainnya. Dengan beragamnya divisi pembagian kelas pekerja yang berkembang saat ini, seharusnya gerakan buruh dapat mengakomodir kelompok kelas pekerja secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, gerakan buruh harus mampu membuat program yang inklusif. Terlebih persoalan yang dihadapi oleh buruh di Korea Selatan juga kini terkait dengan status pekerja tidak tetap, meningkatkan upah minimum, kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki, persoalan terkait jam kerja dan ancaman pemutusan hubungan kerja (Ryu, Wawancara *E-mail* 12 Juni 2017). Seharusnya dengan perkembangan beragamnya divisi kelas pekerja di Korea Selatan, gerakan buruh dapat membuat program agenda gerakan yang mengarah pada isu yang menjadi kepentingan masyarakat sipil lainnya, seperti misalnya pada perihal jaminan sosial. Jika gerakan buruh dapat memahami sumber daya apa yang dibutuhkan masyarakat, maka mereka dapat memperluas basis dukungan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan partai mereka dalam politik elektoral.

KESIMPULAN

Mengacu pada fakta-fakta yang terjadi dalam dinamika strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 menunjukkan bahwa strategi tersebut cenderung tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan struktur kesempatan politik Korea Selatan tergolong belum menguntungkan bagi gerakan buruh dan mobilisasi sumber daya yang

mereka miliki tergolong cenderung lemah. Faktor mobilisasi sumber daya gerakan buruh menjadi faktor yang cukup dominan menyebabkan kondisi tersebut dapat terjadi karena era era demokrasi pada dasarnya telah membuka ruang bagi gerakan buruh untuk terlibat langsung dalam proses politik. Hal ini dikarenakan menurut penulis pada periode tahun 2000-2014, menunjukkan bahwa persoalan kesempatan politik yang dihadapi oleh gerakan buruh masih sama, yakni terkait masalah regionalisme yang masih mewarnai dalam politik, dampak kebijakan ekonomi neoliberalisme yang diberlakukan sejak tahun 1997 dan masalah National Security Law. Oleh karena itu, hambatan pada struktur kesempatan politik kiranya dapat diatasi oleh gerakan buruh dengan memaksimalkan mobilisasi sumber daya mereka.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan konsistensi dari KCTU dan FKTU untuk meningkatkan strategi politik elektoral melalui keberadaan partai buruh. Keberadaan partai buruh yang memiliki hubungan organik dengan organisasi gerakan buruh sangat penting agar partai buruh tidak hanya menjadi sekedar representasi simbolik buruh saja. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengorganisasian internal gerakan buruh yaitu dengan mobilisasi sumber daya yang mereka miliki. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa urgensi gerakan buruh untuk mengembangkan strategi politik elektoral ini bukan berarti menjadikan mereka hanya harus fokus dalam menggunakan strategi politik elektoral saja. Sebagaimana penjelasan Arief Budiman (1987), bahwa perjuangan politik yang dilakukan oleh sebuah kelompok harus tetap menyeimbangkan strategi mobilisasi massa mereka karena strategi ini turut menjadi strategi penting bagi mereka dalam mengadvokasikan kepentingan mereka diluar politik formal. Dengan adanya dua strategi gerakan buruh ini, maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin bagi gerakan buruh untuk tampil sebagai kekuatan politik baru pada era demokrasi Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Azmy, Ana Sabhana. 2011. "Negara dan Buruh Migran Perempuan: Partisipasi Politik Buruh Migran Perempuan di Indonesia dan Ke-

- lompok Buruh Migran dalam Kebijakan Perlindungan Buruh.” *Jurnal Studi Politik 1* (No.2): 129-143.
- Bailey, Daniel. 2010. “Politics on the Peninsula: Democratic Consolidation and the Political Party System in South Korea.” *Graduate Journal of Asia-Pacific Studies 7* (No.1): 32-48.
- Budiman, Arief. 1987. *Jalan Demokratis Ke Sosialisme: Pengalaman Chili Di bawah Allende*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Choi, Inyi. 2005. “Organizing Negotiation and Resistance: The Role of Korean Union Federations As Institutional Mediators.” *Disertasi*, The University of California.
- Collins, Jennifer Noelle. 2006. “Democratizing Formal Politics: Indigenous and Social Movement Political Parties in Ecuador and Bolivia, 1978-2000.” *Disertasi*. University of California, UC San Diego Electronic Dissertations.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diani, Mario. 1997. “Social Movement and Social Capital: A Network Perspective on Movement Outcomes.” *Mobilization: An International Journal 2* (No.2): 129-147.
- Ebenstein, William. 2006. *Isme-Isme yang Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hellman, Ollie. 2011. *Political Parties and Electoral Strategy: The Development of Party Organization in East Asia*. UK: Plagrave Macmillan Publishers.
- Ho, Dan Byung. 2004. “The Democratic Labor Party and the Korean Progressive Movement.” 7 September. *Pidato dalam The 5th ASEM People’s Forum held in Hanoi*. <https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article189> (18 Agustus 2017).
- Jee, Joohee. 2007. “Class Structure and Class Consciousness in South Korea.” *Journal of Contemporary Asia 27* (No.2): 135-155.
- Junghee Ryu (Wakil Juru Bicara *Labor Party*), wawancara e-mail pada 12 Juni 2017.

- Kang, David. 2002. *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines*. Cambridge University Press.
- Koo, Hagen. 1993. *State and Society in Contemporary Korea*. USA: Cornell University Press.
- Korean National Election Commission. 2013. "Statistics of the Elected (National Assembly)." 26 April. http://www.nec.go.kr/engvote_2013/05_resourcecenter/07_02.jsp?num=300&pg=2&col=&sw= (6 Agustus 2017).
- Kraft, Diana. 2006. "South Korea's National Security Law: A Tool of Oppression in an Insecure World." *Wisconsin International Law Journal* 24 (2): 627-659.
- Lee, Su Hoon. 1993. "Transitional Politics of Korea, 1987-1992: Activation of Civil Society." *Pacific Affairs* 66 (3): 351-367.
- Lee, Yeonho dan Yoo-Jin Lim. 2006. "The Rise of the Labor Party in South Korea: Causes and Limits." *The Pacific Review* 19 (3): 305-335.
- Kim, Yunjong. 2012. "The Failure of Socialism in South Korea: 1945-2007." Tesis, University of Sheffield.
- Kleden, Paskal. 2004. "New Labour dan Neue Mitte: Perubahan Dalam Kebijakan Demokrasi Sosial. Analisa Terhadap Labour Party di Inggris dan Sozialdemokratische Partei Deutschlands di Jerman". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology: a Step by Step Guide for Beginners, 3rd Edition*. London: Sage Publication.
- Labourcounts.com*. 2002. "Clause IV: The Original and Current Version." <http://www.labourcounts.com/oldclausefour.htm> (4 September 2017).
- Lee, Hyun. 2015. "South Korean Labor Strikes Back." *Artikel Foreign Policy in Focus*. 12 November. <http://fpif.org/south-korean-labor-strikes-back/> (3 September 2017).
- Lee, Yeonho, Chung, Sukkyu dan Jang, Haehyun. 2008. "Labor and Politics in East Asia: The Case of Failure of the Encompassing Labor Organization in Korea." *Asian Perspective Journal* 32 (3): 111-138.
- Ministry of Employee and Labor. 2015. "Unionization Rate Stands at 10.3 % in 2014, Same as Previous, moel.go.kr." 17 November. <http://>

- www.moel.go.kr/english/poli/poliNewsnews_view.jsp?idx=1174 (6 Agustus 2017).
- Maydom, Barry, Malu Gatto dan Daniel Fedorowycz. 2014. "Institutional Legacies of Authoritarian Regimes: State-sponsored Trade Unions after Democratic Transitions". *Artikel WPSA, Department of Politics and International Relations, University of Oxford*. 1-19.
- McGrath, Ben. 2012. "South Korean "Progressives" line-up behind the Democrats". *The International Committee of the Fourth International (ICFI)*. 15 Desember. <https://www.wsws.org/en/articles/2012/12/15/kore-d15.html> (27 Agustus 2017).
- National Election Commission. 2017. "Election Results of Korean National Assembly, nec.go.kr, 2013." 17 Mei. http://www.nec.go.kr/eng-vote_2013/05_resourcecenter/07_02.jsp?num=492&pg=1&col=&sw (6 Agustus 2017).
- National Elections Commissions. 2017. "Statistics of the elected (Local Elections-City/Province Councilors), nec.go.kr, 2013." 17 Mei. http://www.nec.go.kr/engvote_2013/05_resourcecenter/07_02.jsp?num=294&pg=3&col=&sw= (6 Agustus 2017).
- Nugrahen, Natalia Imas Kristi. 2015. "Pelemahan Organisasi Buruh di Korea Selatan Pasca Krisis Ekonomi 1997-1998." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Oh, Jennifer S. 2012. "Strong State and Strong Civil Society in Contemporary South Korea Challenges to Democratic Governance." *Asian Survey* 52 (3): 528-549.
- Pickard, Jim dan Sarah O'Connor. 2017. "Rise of Jeremy Corbyn Put UK Trade Unions Back in Limelight." <https://www.ft.com/content/01cfa9c8-93e0-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0> (18 Januari 2018).
- Pirie, Iain. 2008. *The Korean Developmental State: From Dirigisme to Neo-Liberalism*. London: Routledge.
- Shin, Kwang-Yeong. 2012. "The Dilemmas of Korea's New Democracy in An Age of Neoliberal Globalisation." *Third World Quarterly* 33 (2): 293-309.
- Subono, Nur Iman. 2007. "Demokrasi dan Buruh: Kajian Teoritis dan Komparatif." *Politea: Jurnal Ilmu Politik* 1 (No.1): 93-114.

- Sung, Jeong Jae. 2008. "The Debate to End the DLP's Pro-North Korea Stance: the Roots of a 20-Year Conflict". *DailyNK*. 1 Februari. <http://www.dailynk.com/english/read.php?num=3212&cataId=nk00400> (16 Februari 2017).
- Tae, Jung Young. 2000. "Labor Movement and Democracy in The Age of Global Neoliberalism: The Case of Korea." *Korea Journal Summer (-)*: 243-273.
- Theguardian.com. 2015. "Clause IV: Brief History." <https://www.theguardian.com/politics/2015/aug/09/clause-iv-of-labour-party-constitution-what-is-all-the-fuss-about-reinstating-it> (18 Januari 2018).
- Valori, Giancarlo Elia. 2016. "Legislative Elections in South Korea Modern Diplomacy." 21 April. http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1363:legislative-elections-in-south-korea&Itemid=645 (16 Februari 2017).
- Wilson. 2004. "Gerakan Buruh dan Politik Progresif di Korea: Taxes to The Rich, Welfare for The Poor." *Jurnal Sedane 2 (2)*: 36-50.
- Winanti, Poppy S. 2003. "Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7 (2)*: 175-204.
- Yoon, Yang Seung dan Mas'ood, Mohtar. 2003. *Masyarakat Politik dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Valenzuela, J. Samuel. 1988. "Labor Movements in Transitions to Democracy: A Framework for Analysis." *Working Paper 104, Kellogg Institute, University of Notre Dame*. (1988): 1-38.